

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kata gender sudah menjadi bahan perbincangan di setiap diskusi- diskusi maupun tulisan pada pembangun dunia. Begitupun di Indonesia, munculnya pemberdayaan masyarakat maupun kalangan pemerintahan juga memperbincangkan masalah gender. Istilah gender sebenarnya adalah sebuah konstruk yang dibentuk oleh masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Padahal sifat-sifat yang terbentuk karena adanya konstruk bisa dipertukarkan. Gender bisa dipertukarkan juga karena berbeda dengan istilah seks yang merupakan perbedaan jenis kelamin secara biologis yang tidak dapat dipertukarkan. Konstruk yang selama ini sudah terbentuk dimasyarakat misalnya, perempuan harus lemah lembut dan emosional. Sementara laki-laki dianggap sebagai orang yang kuat, rasional, jantan dan perkasa. Sedangkan seks berhubungan dengan sifat biologis jenis kelamin tertentu. ¹

Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun secara kenyataan banyak persoalan yang timbul karena adanya perbedaan gender. Adanya kesenjangan antar laki- laki dan perempuan mengakibatkan munculnya ketimpangan dan ketidakadilan yang berdampak negatif bagi perempuan maupun laki- laki. Isu gender muncul dalam berbagai sektor karena belum dirasakan adil oleh masyarakat baik laki-laki

¹ Warni Tune Sumar, "Implementasi Keadilan Gender Dalam Bidang Pendidikan", *MUSAWA*, 1 (Juni, 2015), 166.

maupun perempuan, tetapi hasil pembangunan justru memunculkan adanya kesenjangan antara laki-laki maupun perempuan yang juga disebabkan karena hubungan relasi kuasa yang tidak setara.

Bentuk-bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti munculnya stereotype (pelabelan) pada peran fungsi jenis kelamin yang diberikan masyarakat, marginalisasi (peminggiran) yang bersumber dari keyakinan masyarakat, subordinasi (Penomerduaan) yang mengakibatkan perempuan menjadi nomer dua setelah laki-laki, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda yang disebabkan karna adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa beban ganda tersebut pantas untuk perempuan.

Dalam agama islam gender merupakan isu yang menarik karena bisa kita temukan dan pelajari nilai-nilai yang ada di Al-qur'an dan hadist. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sama. Islam membebaskan perbudakan dan menjunjung persamaan hak tanpa menindas satu sama lain. Ayat-ayat Al-qur'an dan hadist juga banyak yang mengandung konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dihadapan Allah laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi seorang hamba tanpa ada perbedaan yang dominan. Al-quran juga memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan perempuan.²

² Rustan Efendy, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan", *Jurnal Al- Maiyyah*, 2 (Desember 2014), 144.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam UUD 1945 pasal 31 menjelaskan bahwa “setiap warga Indonesia berhak mendapat pendidikan”. Setiap warga berhak mendapat pendidikan itu artinya pendidikan adalah hak segala bangsa dan tidak diperbolehkan adanya pembatasan.

Dalam pendidikan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai posisi yang sama. Tidak ada deskriminasi apapun dalam bidang pendidikan termasuk deskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ruang-ruang pendidikan harusnya tidak didominasi oleh jenis kelamin tertentu dan menjadi landasan hukum bagi perempuan untuk terlibat dalam area pendidikan. Dalam komponen pendidikan baik perencanaan sampai evaluasi harusnya melibatkan perempuan namun pada nyatanya masih terjadi bias gender.

Perlunya usaha untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk mewujudkan masyarakat yang adil. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak didominasi oleh salah satu pihak atau jenis kelamin tertentu (bukan patriarki juga bukan matriarki). Pendidikan yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia harus terus mengarah kepada pendidikan yang memanusiakan manusia.

Dikeluarkannya Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan diperkuat adanya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan diharapkan mampu menjadi solusi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan.

Realitasnya dalam pendidikan banyak deskriminasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh adanya perbedaan gender. Dalam pendidikan deskriminasi gender banyak terjadi pada lingkup birokrasi sekolah maupun pada proses pembelajaran disekolah.

Kaitannya dengan birokrasi sekolah adalah sebagai contoh seorang perempuan dianggap kurang bisa memiliki kemampuan managerial dalam sekolah sehingga menghasilkan jabatan strategis yang dipegang laki-laki. Pandangan tersebut yang tidak menyamakan kemampuan laki-laki dan perempuan. Subordinasi yang demikian akan berakibat pada partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan.

Idealnya dalam praktek pendidikan kesempatan dalam menduduki posisi pimpinan haruslah diukur dari kemampuan bukan dari jenis kelamin. Pembuatan kebijakan dalam lingkungan sekolah juga mempertimbangkan antara laki-laki dan perempuan sehingga keterlibatan dalam program dapat tersalurkan sesuai aspirasi bersama baik laki- laki maupun perempuan. Pada proses pembelajaran harusnya memberikan akses yang sama baik laki- laki maupun perempuan sehigga hak dan kewajiban yang diperoleh antara siswa laki- laki dan perempuan sama.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di madrasah kementrian agama republik Indonesia. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan maksud menghilangkan budaya bias gender pada madrasah yang notabennya pendidikan berbasis agama. Dalam peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak dijelaskan bahwasannya madrasah yang reponsif gender adalah madrasah yang memperhatikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi perempuan dan laki-laki di lingkungan pendidikan.

Penelitian pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri menjadi sangat perlu untuk diteliti melihat madrasah sebagai lembaga pendidikan islam yang harusnya mampu menerapkan keadilan gender baik dalam segi islam maupun segi pendidikannya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti akan meneliti dan menjelaskan tentang implementasi pengarusutamaan gender khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan sebelumnya dari peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian pengarusutamaan gender dalam pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka tujuan diadakannya penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pengarusutamaan gender dalam pendidikan khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penerapan pengarusutamaan gender dalam pendidikan khususnya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan bagi lembaga pendidikan baik kampus maupun madrasah serta diharapkan mampu menjadi referensi yang untuk peneliti di masa yang akan datang.
2. Praktis:
 - a. Sebagai bahan evaluasi bagi madrasah dan juga pembuat kebijakan serta memberikan kontribusi untuk membantu memecahkan masalah yang terjadi di madrasah khususnya masalah kesetaraan gender.
 - b. Sebagai bentuk sumbangsih terhadap khasanah keilmuan dalam dunia pendidikan islam
 - c. Sebagai bentuk menuju arah pembelajaran yang lebih baik bagi penulis

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, dengan judul “Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri”. Diantara penelitian-penelitian itu yakni:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Yuniati yang berjudul “Implementasi Kesetaraan Gender di SD IT Permata Bunda 2 Bandar Lampung”. Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui implementasi kesetaraan gender dan faktor pendorong maupun faktor penghambat di SD IT Permata Bunda Bandar Lampung. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwasannya masih kurangnya penerapan atau pelaksanaan kesetaraan gender di sekolah dari pendidik maupun peserta didik.³

Dalam skripsi ini peneliti lebih menekankan pada pengeimplementasian gender dalam pembelajaran pada peserta didik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih memfokuskan pada pengimplementasian gender pada kebijakan, program, dan kegiatan madrasah.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Malaya Dewi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah”. Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang PUG di Klaten. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan PUG ini dilakukan pada pendidikan formal dan informal dan hanya sebatas sosialisasi belum ada tindak lanjut.⁴

³ Yuyun Yuniati, “IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DI SD IT PERMATA BUNDA 2 BANDAR LAMPUNG”. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018

⁴ Firdaus Malaya Dewi. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH”. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2014

Dalam skripsi ini penulis menekankan pada kebijakan PUG yang diterapkan secara umum dan luas oleh dinas terkait di daerah baik dalam pendidikan formal maupun non formal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di masing- masing lembaga pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kediri.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ainun Rofiah yang berjudul “Pengarutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam kebijakan Pendidikan Islam tahun 2010- 2014”. Dalam thesis ini penulis ingin mengetahui sejauh mana kebijakan kebijakan pengarusutaman gender dalam pendidikan islam yang sudah berjalan. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasannya masih ditemukan beberapa masalah yang belum mencerminkan gender mainstreaming dalam kebijakan pendidikan Islam.⁵

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan terkait kebijakan reponsif gender dalam pendidikan secara umum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada kebijakan, program, dan kegiatan madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se-kota Kediri.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tifa Musdalifah yang berjudul “Implementasi Pendidikan Sadar Gender Di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul”. Dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui sejauh mana implementasi pendidikan sadar gender di Desa

⁵ Ainun Rofiah, “PENGARUSUTAMAAN GENDER (GENDER MAINSTREAMING) DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2010- 2014”. Thesis Program Studi Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015

Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pengimplementasian pendidikan sadar gender dilakukan pada lingkup individu, keluarga dan masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi implementasi pendidikan sadar gender.⁶

Dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan terkait program pemberdayaan masyarakat terpadu terkait perempuan. Sedangkan yang akan di teliti oleh penulis adalah terkait program dan kebijakan di madrasah.

⁶ Tifa Musdalifah, "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SADAR GENDER DI DESA NGALANG, KECAMATAN GEDANGSARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL". Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017.